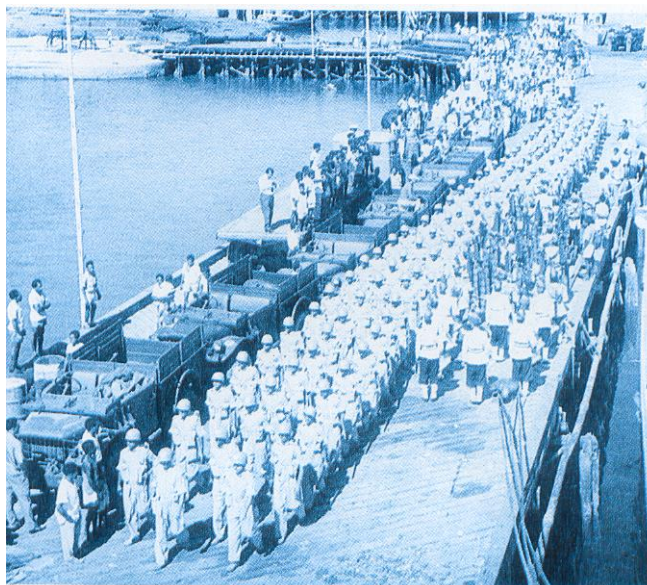


## BAB VII

### PENYERAHAN ADMINISTRASI PAPUA BARAT

#### A. Administrasi Papua Barat dibawah UNTEA

Berdasarkan Perjanjian New York yang ditanda-tangani tanggal 15 Agustus 1962 di Markas Besar PBB, New York – Amerika Serikat antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Nederland mengenai Papua Barat. Maka dibentuklah suatu Badan Penguasa Sementara PBB yang diberi nama UNTEA (*United Nations Temporary Executive Authority*) yang akan berkuasa selama 1 (satu) tahun sesuai perintah dari Sekretaris Jenderal PBB. Serta dibantu oleh UNSF (*United Nations Security Force*) untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Papua Barat selama penguasaan UNTEA. Pasukan UNSF yang ditugaskan ke Papua Barat berasal dari Canada, India, Amerika, Nigeria, Swedia, Ceylon, Australia dan Pakistan.<sup>1</sup>



Gambar. 7.1. Pasukan Infanteri Pakistan sebanyak 1500 personel tiba di Papua Barat  
Sumber: <http://www.pakistanarmy.gov.pk/AWPReview/TextContent.aspx?pId=51&rnd=194>

---

<sup>1</sup> United Nation Peacekeeping. Security Force In West New Guinea.  
<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unsf.htm>

Tugas Pokok UNTEA yaitu:

1. Menerima penyerahan Administrasi Pemerintahan Negara Papua Barat dari pihak Belanda
2. Menyelenggarakan Pemerintahan yang stabil di Papua Barat selama kurun waktu tertentu.
3. Menyerahkan Administrasi Pemerintahan Negara Papua Barat kepada Pemerintah Republik Indonesia.<sup>2</sup>



Gambar. 7.2. Medali Penghargaan UNTEA

Sumber: <http://www.un.org/en/peacekeeping/sites/medals/untea.htm>

UNTEA dan UNSF mulai mengambil alih Administrasi Papua Barat dari tangan Belanda pada 1 Oktober 1962 berdasarkan Pasal 2 Perjanjian New York bersamaan dengan penyerahan Administrasi Pemerintahan Negara Papua Barat dari Belanda kepada UNTEA. Proses Penyerahan Administrasi Pemerintahan Papua Barat dilakukan Belanda sesuai prosedur yang termuat dalam Perjanjian New York dan Perjanjian Roma sehingga Belanda mampu menenangkan Rakyat Papua Barat dengan memberikan informasi bahwa Bangsa Indonesia mengontrol administrasi Negara Papua Barat hanya selama 25 tahun saja selanjutnya akan dikembalikan kepada rakyat Bangsa Papua. Janji ini sampai saat ini masih dipegang oleh Generasi Tua Bangsa Papua hingga diteruskan kepada Generasi Muda Penduduk Asli Bangsa Papua. Tetapi anehnya, mengapa pada saat Pemerintahan UNTEA semua administrasi Negara Papua Barat dihilangkan seperti atribut Bendera Papua, Lagu Hai Tanah Ku Papua, dan semua atribut kenegaraan Papua Barat

<sup>2</sup> DR. John. R. G. Djopari. Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka. PT. Grasindo. Jakarta.1993. Hal. 54

dihilangkan kecuali mata uang Niuew Guinea Gulden saja yang diteruskan/dipakai UNTEA.

Siapakah aktor di belakang sandiwara ini? Yang jelas pasti Negara ambisi yang ingin mengusir Belanda keluar dari Papua sehingga mereka leluasa bersama Indonesia siap mencuri kekayaan alam Papua di Tembagapura.

Pasukan UNSF dan UNTEA yang diutus ke Papua Barat adalah Negara-Negara yang pada dasarnya memang sudah diatur untuk bersama Indonesia mengeruk hasil Bumi Papua dibawah pimpinan Amerika. (*Lihat Lampiran: U.S. DEPARTMENT OF STATE 95/03/06 Foreign Relations, 1961-63, Vol XXIII, Southeast Asia Office of the Historian*)<sup>3</sup>

UNTEA pertama dipimpin oleh José Rolz-Bennett dari Guatemala dan kemudian digantikan oleh Djalal Abdoh dari Iran.

Selama Pemerintahan UNTEA dipergunakan mata uang New Guinea Gulden sesuai dengan penetapan oleh Parlement New Guinea (NGR) pada saat Deklarasi Manifesto Politik Papua Barat oleh Komisi Nasional Papua Barat di Hollandia tanggal 19 Oktober 1961.



Gambar. 7. 3. Mata Uang 25 Gulden New Guinea  
Sumber: <http://www.vanderheijden.org/ng/currency.html>

Sesuai Perjanjian New York, maka UNTEA mulai mengambil alih Administrasi Pemerintahan Papua Barat pada tanggal 1 Oktober 1962.

<sup>3</sup> US Department of State. Foreign Relation of United State, Southeast Asia Office of Historian.  
[http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/frus/summaries/950306\\_FRUS\\_XXIII\\_1961-63.html](http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/frus/summaries/950306_FRUS_XXIII_1961-63.html)

Penyerahan Administrasi Negara Papua Barat dari Belanda kepada UNTEA berlangsung di Hollandia.



Gambar. 7. 4. Kamp UNTEA di pulau Biak  
Sumber: <http://www.115atu.ca/new.htm>

Kedudukan UNTEA dan UNSF tidak diterima oleh Penduduk Asli Papua sehingga terjadi beberapa penyerangan pos-pos UNTEA dan UNSF seperti penyerangan pos UNTEA dan UNSF oleh Batalyon Kasuari (Papoea Vrijwilleger Korps) yang dipimpin oleh Sergean PVK Permenas Ferry Awom dan Marthinus Jimmy Wambrau serta dibantu oleh Polisi Papua Pimpinan Johannes Jambuani. Polisi Papua ditugaskan untuk menyerang markas militer Indonesia (TNI) di KOREM-Manokwari sedangkan penyerangan Pasukan UNSF asal Pakistan dan Australia yang berada di Reremi dan Fasharkan wilayah Manokwari pada bulan Februari 1963, setelah itu Batalyon Kasuari (PVK) kembali ke markasnya di Arfai sedangkan Polisi Papua langsung mengosongkan posnya di Kampung Ambon-Manokwari. Untuk mematahkan PVK di Arfai, maka UNSF berhasil menipu mereka untuk mengadakan kerja sama berupa lari bersama ke Andai tanpa senjata sehingga mereka (PVK) ketika kembali ke markasnya di Arfai ternyata semua fasilitas markas PVK

telah direbut UNSF. Akhirnya seluruh anggota PVK dipulangkan ke masing-masing daerahnya di seluruh tanah Papua sedangkan Pimpinannya (Awom dan Wambrau) ditahan untuk diadili di bekas kantor Gubernur Netherland Niuew Guinea (Sekarang kantor Gubernur Papua Barat) kemudian dijatuhi hukuman penjara selama masa UNTEA. Mereka kemudian dibebaskan pada tanggal 30 April 1963 sebelum penyerahan Administrasi Negara Papua kepada Indonesia.<sup>4</sup> Penyerangan dilakukan karena UNTEA menghilangkan atribut Negara Papua Barat kecuali mata uang NG Gulden.



Gambar. 7. 5. Markas PVK di Arfai – Manokwari (foto Kiri) dan Pasukan PVK di Arfai (foto Kanan)  
Sumber: <http://www.visser-maritiem.nl/Papoea%20Vrijwilligers%20Korps.html>

Anehnya, proses penyerangan ini tidak pernah dilaporkan Pimpinan UNTEA kepada SEKJEN PBB tetapi beliau hanya melaporkan tentang kegiatan protes yang dilakukan oleh Barisan Merah Putih yang berasal dari orang-orang Serui dan orang-orang Maluku yang seharusnya tidak memiliki hak atas tanah New Guinea ini. Aksi mereka ini selalu dilaporkan kepada SEKJEN PBB supaya PEPERA tidak perlu dilakukan dan segera ditarik pasukan UNTEA dan UNSF dari seluruh wilayah Papua Barat.

## **B. Administrasi Papua Barat dibawah Indonesia**

Proses peralihan Administrasi Negara Papua Barat dari UNTEA ke Indonesia sesuai procedure yang ditetapkan dalam Perjanjian New York. Selama keberadaan UNTEA dan UNSF di Papua, Pemerintah Indonesia menggunakan taktik provokasi untuk mendesak pasukan UNTEA segera mundur dari Papua Barat dan menolak Pelaksanaan Penentuan Nasib Sendiri. Sedangkan rakyat Papua yang memprotes untuk menolak Indonesia dihajar

<sup>4</sup> Wawancara dengan Alm. Marthinus Jimmy Wambrau. Manokwari. 1999.

habis oleh Pasukan Indonesia dan anehnya hal ini dibiarkan UNTEA begitu saja. Bahkan Pimpinan UNTEA Djalal Abdoh melaporkan kepada Sekretaris Jenderal PBB U Thant hanya tentang desakkan masyarakat yang menolak PEPERA dan mendesak UNTEA segera keluar dari Papua. (*Lihat Lampiran Surat Djalal Abdoh ke SEKJEN PBB U Thant*)<sup>5</sup>

Pada masa penguasa UNTEA, rakyat Papua telah diadakan uji coba Referendum di kabupaten Merauke tetapi seluruh rakyat menolak Indonesia. Oleh karena itu, dilakukan suatu perundingan rahasia di ibu kota Italy, Roma pada tanggal 30 September 1962 yang mana aturan International yang ditetapkan dalam Perjanjian New York 15 Agustus 1962 harus dirubah menjadi aturan Musyawarah sesuai dengan Praktek Parlemen Indonesia.<sup>6</sup>

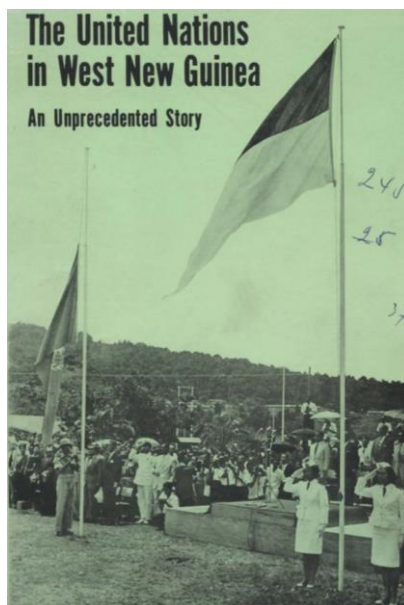


Gambar. 7. 6. Demonstrasi Anti Indonesia di depan kantor Parlemen Papua Barat (NGR)  
Sumber: <http://wpik.org/Src/SMH/19620812.gif>

Akhirnya pada tanggal 1 Mei 1963 secara resmi berakhirnya penguasaan Administrasi Papua Barat dari tangan UNTEA dan selanjutnya administrasi Negara Papua Barat dilanjutkan oleh Pemerintahan Indonesia.

<sup>5</sup> United Nation Secretariat Achieves. Djalal Abdoh Letter to U Thant. Hal.7. <http://archives-trim.un.org/webdrawer/rec/422783/view/Items-in-Peace-keeping%20operations%20-%20West%20Irian%20-%20UNTEA%20-%20Dr.%20Djalal%20Abdoh.PDF>

<sup>6</sup>Hasil Wawancara antara Pdt. Herman Saud, S.Th. M.Th dan Bapak Kaiba.



Gambar. 7.7. Penyerahan Administrasi Negara Papua dari UNTEA ke Indonesia di Hollandia  
 Sumber: <http://www.vanderheijden.org/ng/ngimages/UNTEA%20cover.jpg>

Kedatangan Bangsa Indonesia di seluruh tanah Papua Barat sangat menakutkan dan keji karena terjadi perampokan, pemerkosaan, penindasan, penjarahan, penculikan, pembunuhan, pembasmian dokumen tentang Papua Barat dan penahanan terjadi di mana-mana akibat miskinnya militer Indonesia. Hal ini, menyebabkan timbulnya rasa anti Indonesia yang sangat dalam. Akibatnya terjadi perlawanan rakyat penduduk asli Papua yang dipimpin oleh Aser Demotokay pada tahun 1963 di Hollandia (sekarang Jayapura) hingga berlanjut di Manokwari pada tahun 1965.

*Republik kita malu, imejnya jelek sekali. Waktu itu memang Republik kita memang sedang susah. Coklat, Kembang Gula, atau Bir yang memang hanya ada di IRIAN, diangkut semua. Botol-botol yang ditanam untuk pagar, digali, diambil, diangkut. Saya sendiri sempat ikut-ikutan membawa karpet.* (Nurinwa Ki S. Hendrowinoto, dkk. Acub Zainal I Love the Army. Jakarta. 1998. Hal. 76).

Gerakan perlawanan rakyat Penduduk Asli Papua terus berlanjut hingga saat berlangsungnya pelaksanaan PEPERA tahun 1969 dan kontinu sampai saat ini. Perjuangan Pembebasan Bangsa Papua dari NKRI tidak mengenal lelah, turun-temurun tetap dilanjutkan hingga Bangsa Indonesia harus mengakui Hak Bangsa Papua sebagai sebuah Negara Berdaulat yang telah

dideklarasikan oleh Komisi Nasional Papua Barat dalam gedung Parlemen Papua Barat (*New Guinea Raad*) pada tanggal 1 Desember 1961.

Pendudukan secara paksa oleh Bangsa Indonesia di Tanah Papua sehingga Tanah Papua hanya disahkan melalui PENPRES No. 1 Tahun 1963 menjadi Provinsi ke-26 Republik Indonesia sehingga otomatis Manusia Papua dan Alamnya adalah bukan bagian dari NKRI karena hingga saat ini tidak pernah disahkan melalui Undang-Undang RI menjadi Provinsi. (*Lihat Lampiran: INPRES No. 1 Tahun 1963*)